

DEPOLITISASI NAHDLATUL ULAMA 1968-1983**Arif Hidayatullah**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: arif.084284047@gmail.com**M. Ali Haidar**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya**Abstrak**

Setelah Indonesia merdeka NU dalam banyak kesempatan turut mengisi kemerdekaan dengan menempatkan beberapa tokohnya dalam posisi penting. Keikutsertaan berpolitik seperti ini secara tidak langsung telah mengantar NU yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan dan budaya bertransformasi menjadi organisasi kemasyarakatan yang juga menjalankan fungsi politik. Masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto melalui pelantikan dirinya oleh MPR pada 1968 merupakan awal dari gerak baru sejarah Bangsa Indonesia dan juga sejarah baru bagi seluruh lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama. NU yang saat itu sudah terjun ke dalam percaturan politik nasional dengan merubah dirinya menjadi sebuah partai politik dikhawatirkan akan menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat membahayakan posisi Pemerintahan Orde Baru jika terjadi ketidakselarasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang diawali dengan tahap heuristik, dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan sumber atau data berupa koran sejaman dan buku yang berkaitan dengan rumusan masalah diantaranya faktor pendorong depolitisasi NU, proses depolitisasi NU dan, pengaruh proses depolitisasi NU. kemudian data tersebut diuji validitasnya dengan kritik intern yaitu pengujian data dari satu data dengan data yang lainnya hingga didapatkan fakta, kemudian fakta-fakta yang terkumpul diinterpretasikan secara kronologis, dan ditahap historiografi dihasilkanlah sebuah laporan dari hasil penelitian sejarah yang berjudul “ Depolitisasi Nahdlatul Ulama 1968-1983”.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka ditemukan beberapa poin yang dapat dijadikan jawaban atas rumusan masalah diatas. Faktor pendorong depolitisasi NU antara lain adalah, NU dianggap sebagai kekuatan besar dengan segenap dukungan massanya sehingga dikhawatirkan menyaingi kekuatan pemerintah Orde Baru pada masa itu, sehingga perlu direduksi. Proses depolitisasi tersebut terjadi dalam beberapa bentuk, mulai dari penerapan pancasila sebagai ideologi organisasi hingga intervensi pemerintah terhadap PPP. Segala upaya depolitisasi NU pada masa Orde Baru membawa perubahan besar dalam NU. Adapun pengaruh proses depolitisasi tersebut antara lain kembalinya NU ke *Khittah 1926* yaitu sebagai *jam'iyah diniyyah* dan meninggalkan fungsi politiknya. Depolitisasi NU ini menarik untuk dikaji karena sebagai sebuah organisasi yang besar NU mempunyai sejarah dinamika politik yang cukup menarik, terutama pada masa Orde Baru saat kedua kekuatan tersebut harus berhadapan demi menjaga eksistensinya masing-masing. Selain itu masih sedikit penelitian yang membahas tentang perpolitikan NU, khususnya yang menitikberatkan pada proses depolitisasi NU.

Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Orde Baru, Pancasila, Depolitisasi.

Abstract

After Indonesia became independent, NU on many occasions fill out his character by placing some independence in important positions. This kind of politic participation indirectly have led NU oriented social activities of religious and cultural transform into a political function. The Orde Baru lead by Suharto through his inauguration by the MPR in 1968 was the beginning of a new history of Indonesia's motion and also a new history for the whole institutions or social organizations viable in Indonesia, including Nahdlatul Ulama. NU, which at that time was already plunging into the national political scene by changing its self into a political party it is feared will become a great power that can compromise the position of the Government of the Orde Baru if there is disharmony.

This research uses the methods of historical research that begins with the stage of heuristics, in this stage the author does the collection of data in the form of a newspaper source or coeval and books relating to the formulation of the problem were the driving factor depolitisasi NU, NU and depolitisation process, the influence of the process of depolitisation. the data is then tested validity with internal criticism that the test data from one data with other data to obtain the facts, then the facts accumulated interpreted chronologically, and at stage of historiography made a report of the results of historical research, entitled "Depolitisation of Nahdlatul Ulama 1968-1983".

From the results of research that has been done, then the author found some points that could be the answer to the above problem formulation. The driving factor depolitisation of NU, NU among others are considered large with all strength support its mass so feared rival the power of the Government of the Orde Baru at that time, so it needs to be

reduced. Depolitisation process occurs in several forms, ranging from the Organization's ideology Pancasila as its applicability to government intervention against to the PPP. Every effort depolitisation of NU in the Orde Baru brought major changes in NU. As for the influence of the process of the return of, among others, depolitisasi NU to Khittah 1926 as jam'iyah diniyyah and leaving his political functions. Depolitisasi NU is exciting for studied because as an organization that has a history of political dynamics of NU which is quite interesting, especially on the Orde Baru as both the power must be faced in order to keep the existence of each. In addition it is still a little research that discusses the political situation of NU, specifically focusing on the process of depolitisation of NU.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Orde Baru, Depolitisation.

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut dengan singkatan NU dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dengan sejarah nasional Bangsa Indonesia. Organisasi ini mempunyai ciri khusus jika dibandingkan dengan organisasi agama yang lain, NU bersifat lebih fleksibel dengan tetap menjaga dan mengakomodasi budaya-budaya setempat. Maka dari itu NU sering juga disebut sebagai organisasi keagamaan yang bersifat tradisional. NU lahir pada masa kolonial dan ikut menjadi saksi bahkan tidak jarang ikut serta dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan baik pada masa Hindia Belanda maupun masa Jepang.

Setelah Indonesia merdeka NU dalam banyak kesempatan turut mengisi kemerdekaan dengan menempatkan beberapa tokohnya dalam posisi penting ketatanegaraan seperti apa yang dilakukan oleh KH. Wahid Hasyim dan KH. Bisri Syamsuri. Kesadaran berpolitik seperti ini secara tidak langsung telah mengantarkan NU yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan dan budaya bertransformasi menjadi organisasi keagamaan yang juga menjalankan fungsi politik.

Pada masa Soekarno, NU dianggap terlalu dekat dengan Panglima Besar Demokrasi Terpimpin tersebut, bahkan kedekatan NU dapat disejajarkan dengan PKI yang saat itu menjadi sebuah warna tersendiri yang bertentangan dengan NU. NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia merasa mempunyai tanggung jawab besar akan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kedekatan PKI dengan Pemerintahan Soekarno sehingga NU juga tidak ingin ketinggalan dengan ikut mendekati diri kepada Pemerintahan Soekarno. Pada awalnya kedekatan tersebut mendapat protes dari internal maupun eksternal NU, organisasi ini dianggap terlalu oportunis bahkan materialistis dengan memanfaatkan kedekatannya tersebut guna mencari keuntungan golongan dengan menempatkan orang-orangnya dalam birokrasi pemerintahan¹. NU juga mempunyai tujuan yang tidak boleh kita pandang sebelah mata seperti upaya untuk mengimbangi kekuatan PKI dari dalam, dengan membentuk lembaga-lembaga tandingan bagi setiap lembaga yang sudah ada dalam tubuh PKI seperti LEKRA yang kemudian disaini oleh LESBUMI, ada BTI yang disaini oleh PERTANU, adapula SOBASI yang disaini oleh SUBURMUSI.

Masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto melalui pelantikan dirinya secara sah oleh MPR pada 1968 merupakan awal dari gerak baru sejarah Bangsa Indonesia dan juga sejarah baru bagi seluruh lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama. Fusi partai serta Pemurnian Pengamalan Pancasila yang digadang rezim Orde Baru mengharuskan segala lembaga atau organisasi yang ada untuk menerima dan menerapkan asas tunggal Pancasila. Bahkan penyeragaman ini juga terjadi dalam dunia pendidikan pesantren dengan program penyeragaman kurikulum pesantren di era 1970an². NU yang saat itu sudah terjun ke dalam percaturan politik nasional dengan merubah dirinya menjadi sebuah partai politik dikhawatirkan akan menjadi sebuah kekuatan besar yang dapat membahayakan posisi pemerintahan orde baru jika terjadi ketidakselarasan. Berkaca pada pemilu Desember 1955 yang menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan dimana NU mendapatkan 45 kursi di parlemen dimana sebelumnya hanya 8 kursi, banyaknya kursi yang didapat menunjukkan peta kekuatan NU yang semakin menguat sejak keluar dari Masyumi, hal ini sekaligus menunjukkan NU memiliki kekuatan dalam kendali politik nasional sejak orde lama dan berlangsung hingga orde baru. Pancasilaisasi Orde Baru secara tidak langsung menertibkan organisasi-organisasi sosial politik yang ada, NU terpaksa meleburkan diri dalam PPP bersama beberapa organisasi politik bercorak Islam lainnya.

Pemerintahan Orde Baru memiliki cara pendekatan yang cenderung bersifat kultural dengan memasukkan budaya Jawa dalam unsur pemerintahannya. Trikotomi antara Abangan, Priyayi, dan Santri masih berlaku pada masa Orde Baru³, sehingga dapat dikatakan bahwa antara ketiga golongan tersebut golongan manakah yang mendominasi dalam masyarakat maka golongan tersebutlah yang mempunyai kekuatan terbesar. Kesadaran pemerintah dalam hal ini Soeharto atas pentingnya dominasi massa membuatnya mencari cara untuk menciptakan wadah guna menggalang dukungan yang tidak terbatas golongan tertentu, baik agama, ras, bahasa serta tingkat ekonomi dan pendidikan. Golongan Karya yang dibidani oleh beberapa organisasi seperti Kosgoro dan beberapa organisasi lainnya merupakan jawaban atas permasalahan pemerintah Orde Baru untuk menghimpun massa. Bentuk dari organisasi ini sangatlah

¹ Greg Fealy. 2003, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta:LKIS, hlm. 52.

² As'ad Said Ali. 2008, *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*. Jakarta:LP3ES, hlm. 73.

³ Gertz, 1980. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm 16.

unik bahkan dapat dikatakan rumit, karena Golkar bukan sebuah partai layaknya PPP ataupun PDI, tetapi kedudukannya sama dengan kedua partai tersebut. Golkar diberikan jalan oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan secara tidak langsung pemerintah juga memfasilitasi organisasi ini guna mendapatkan dukungan sebanyak mungkin termasuk melakukan tekanan-tekanan seperti yang terjadi pada setiap pegawai negeri dengan diharuskan untuk memberikan suara atas hak pilihnya kepada Golkar.

Penyederhanaan partai pada era Orde Baru ini bisa bermakna sebagai strategi untuk tidak menghidupkan kembali ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat sesuai dengan ideologi partai politik yang ada⁴. Hal tersebut juga sebagai lanjutan aksi *desoekarnoisasi* Orde Baru guna menghapus segala hal yang merupakan peninggalan Soekarno termasuk partai politik peninggalan Orde Lama. Kalangan militer maupun sipil yang tidak suka dengan Soekarno juga secara gigih menghapus unsur-unsur Soekarno yang masih bertahan dalam masyarakat, partai politik, bahkan birokrasi pemerintahan. Hal ini dilakukan karena mereka yakin bahwa perkembangan ideologi kepartaian harus dikendalikan agar tidak terbentuk kubu-kubu sesuai ideologi kepartaian yang ada sehingga memunculkan kemungkinan terjadinya konflik berkepanjangan antar kubu. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah Orde Baru beserta pendukungnya memiliki pandangan bahwa kubu-kubu tersebut harus dirapikan guna keberlangsungan pembangunan Orde Baru. Proses depolitisasi Orde Baru menurut pengamatan banyak dipengaruhi oleh modernisasi yang berkiblat pada bangsa barat, seperti yang diupayakan oleh Mayjen Dharsono dengan mengusulkan sistem Dwi Partai seperti yang diterapkan di Amerika dan beberapa negara di Eropa untuk menggantikan banyaknya partai yang ada sepeninggal Orde Lama⁵. Upaya penyederhanaan partai tersebut didasari oleh keinginan untuk menekan banyaknya ideologi yang diusung oleh tiap partai sehingga perlu adanya wadah baru untuk merampingkan ideologi-ideologi tersebut guna menciptakan stabilitas politik.

B. Pembahasan

Fusi partai merupakan cara paling efektif untuk mengeliminir peran-peran politik kalangan Islamis dan nasionalis. Keberadaan kedua partai itu boleh dikatakan sebagai strategi untuk tidak mengkritik pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh ABRI dan kalangan pembaru dan yang kurang menyukai keberadaan parpol, karena menurut Liddle, Soeharto sebenarnya anti partai⁶. Banyak kalangan menganggap bahwa dua partai yang mendominasi kekuatan di dua

partai baru itu adalah NU di PPP dan PNI di PDI. Sementara pemerintah sendiri, khususnya terhadap partai-partai Islam dilihat sebagai obyek strategis untuk dengan mudah menguasai massa mereka, karena cukup dengan melakukan pendekatan kepada para tokoh atau pimpinannya, dimana massa mereka akan mengikuti tokoh tersebut.

Dalam situasi massa pengembangan pola politik seperti ini niscaya parpol berangsur-angsur akan kehilangan massa karena mereka tidak lagi diperbolehkan untuk setiap saat berhubungan dengan massa pendukungnya di desa, sementara pemerintah desa yang sudah dibersihkan dari unsur-unsur parpol dan kemudian digantikan oleh orang-orang Golkar termasuk penempatan anggota-anggota ABRI yang dikaryakan sebagai kepala desa, menggarap massa pendukung parpol dengan berbagai cara termasuk intimidasi sehingga massa penduduk desa dipastikan terjaring oleh Golkar.

Di jajaran birokrasi pegawai negeri, wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) juga menjadi instrumen Golkar untuk merebut suara pendukung Golkar, baik dari pegawai negeri sendiri maupun keluarganya. Sementara di kalangan organisasi Islam, pemerintah yang dalam Pemilu 1971 telah memanfaatkan GUPPI yang mampu memecah belah pendukung partai-partai Islam khususnya NU supaya suara dari PPP tidak dapat menyaingi suara Golkar yang notabene merupakan partai pemerintah, setelah dalam organisasi ini terjadi konflik antara kubu-kubu yang pro dan kontra terhadap pemerintah, maka pada tahun 1978 Golkar mendirikan satu organisasi baru yang bernama Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) yang diprakarsai langsung oleh ketuanya saat itu Amir Murtono. Meskipun pendirian MDI berimplikasi pada adanya silang pendapat bahkan ketegangan diantara elit Golkar pusat, yang sepertinya kelompok Amir Murtono hendak menyaingi keberadaan GUPPI yang pada saat itu dibawah pengaruh kuat kelompok Ali Murtopo, namun hal itu semata merupakan strategi untuk menyiapkan MDI sebagai alternatif jika GUPPI terpecah.

Dalam kondisi perpolitikan masa Orde Baru dimana Parpol menjadi sangat lemah posisinya, akibat ditiadakannya unsur Parpol di birokrasi. Jika pada masa Soekarno hingga masa transisi sampai Pemilu 1971, masih ada wakil-wakil partai di kabinet, maka setelah Pemilu 1971 seluruh anggota kabinet bebas dari unsur Parpol. Kabinet didominasi oleh ABRI dengan dwi fungsinya menjadi semakin kokoh di birokrasi dan politik. Kondisi tersebut dapat dilihat pasca Pemilu 1971 disepakati bahwa wakil ABRI sejumlah 100 orang di DPR, tanpa dipilih.

Parpol sangat lemah dengan sumberdaya manusia yang dipaksa sesuai dengan kebutuhan pembangunan Orde Baru. Tokoh-tokoh Parpol dianggap peninggalan sistem Soekarno yang berorientasi politik dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi, yang tentu saja didalam perekrutan partai-partai politik lebih mengandalkan kekuatan massanya daripada kualitas sumber daya manusianya. Pada saat yang sama, kalangan

⁴Santoso, Priyo B. 1998. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

⁵Cahyono. 1982. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980. Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 63.

⁶Liddle. *Ibid*. hlm.132.

cehndikiawandan intelektual nampaknya kebanyakan kurang menerima keberadaan partai-partai politik, sehingga mereka lebih banyak memberi dukungan pada Golkar yang memandang kalangan profesional merupakan salah satu golongan yang diuntungkan oleh pemerintahan Orde Baru selain unsur penguasa dan ABRI⁷. Disini menunjukkan bahwa partai Islam (PPP) tidak selalu merepresentasikan kekuatan Islam modern, bahkan ketika pada awalnya NU sangat dominan dalam partai itu, banyak kalangan yang memilih bahwa PPP kurang lebih sama dengan profil partai tradisional. Sementara orang-orang Islam yang sudah tertempa sumber dayanya terjaring dalam birokrasi dan Golkar. Keberuntungan baik secara politis maupun ekonomi mereka dianggap hanya bisa tercapai melalui kolaborasi atau dukungan pemerintahan Golkar, karena memang pada masa itu di partai politik baik PPP atau PDIanggotanya hanya akan menjadi orang-orang tersisih.

Kenyataan situasi dan iklim politik yang tercipta seperti itu menjadikan organisasi-organisasi sebagai unsur partai termasuk NU tenggelam didalamnya. Penjelasan diatas lebih merupakan faktor eksternal parpol yang mempengaruhi kondisi internal dan sepak terjang parpol itu sendiri. Selain didalam parpol sendiri khususnya PPP, mengalami ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Campur tangan pihak birokrasi dan ABRI dalam menentukan ketua PPP menjadi masalah tersendiri dalam tubuh partai.

Penyatuan partai-partai Islam kedalam PPP sebetulnya merupakan upaya penyederhanaan partai yang merugikan partai-partai Islam sendiri. Sebab sejarah keberadaan partai-partai Islam, sejak semula hanya bersifat organisasi sosial keagamaan seperti halnya NU, Muhammadiyah, Sarikat Islam dan Perti, yang selalu diwarnai dengan ketegangan diantara tokoh-tokohnya karena perbedaan cara pandang dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ini artinya usaha pemerintah dalam menyatukan partai di balik obsesinya untuk menyederhanakan pembinaan, sebenarnya sudah mengabaikan latar belakang sejarah organisasi dengan latar belakang “ideologi gerakan” yang berbeda. Memang pada kondisi tertentu diantara organisasi-organisasi Islam itu pernah bersatu, seperti halnya terjadi pada masa penjajahan Belanda dengan didirikannya MIAI, Masyumi pada zaman Jepang dan Partai Masyumi pada masa kemerdekaan. Namun stabilitas organisasi itu hanya bersifat sementara, pada saat mereka sama-sama merasakan tantangan dari luar yang harus dihadapi dengan kesatuan Islam. Namun setelah berjalan beberapa lama, benih-benih konflik lama kembali muncul menjadi pemicu konflik. Penyebab konflik itu dari waktu ke waktu memiliki benang merah berupa upaya mempertahankan ideologi gerakan dan perebutan status dan kekuasaan didalam organisasi pemersatu, dengan demikian yang semula diharapkan menjadi pemersatu, kemudian menjadi wadah dimana tokoh-tokohnya saling memperuncing konflik.

Oleh karena itu banyak kalangan yang menilai bahwa penyatuan partai-partai Islam kedalam satu partai (PPP) merupakan setrategi pemerintahan Golkar untuk melanggengkan konflik internal yang secara politis tidak menguntungkan untuk merebut simpati dari luar (masa pendukung), sehingga pada saat bersamaan simpati massa akan lari ke Golkar dengan kepemimpinan yang mapan dan kondisi internal organisasi yang stabil, atau pada saat konflik terjadi, memudahkan pembina politik dan birikrasi dan ABRI untuk campur tangan yang pada dasarnya merupakan campur tangan Golkar.

Konflik yang terjadi pada tubuh orsospol khususnya PPPdan PDI lebih banyak dilatar belakang oleh masalah kelangkaan posisi dan sumber-sumber (recources)⁸. Jika ditarik pada perspektif Weberian, posisi dan sumber –sumber itu merupakan status yang berkaitan dengan kekuasaan dan ekonomi. Status yang diperebutkan oleh para tokoh yang dulunya otonom dalam partainya sendiri berupa posisi, misalnya unsur pimpinan menjadi sangat terbatas karena memang sudah diperkecil dalam satu partai.

Konflik yang terjadi di PPP dapat dilihat sebagai akibat dari tarik menarik antara kepentingan eksternal dengan peluang konflik internal tersebut. Pada taraf awal fusi partai, unsur NU mendominasi partai dengan ditempatkannya Majelis Syuriah PPP yang diketuai oleh KH.Idham Chalid dan perolehan kursi di DPR sejumlah 58kursi dari 94 kursi yang dimenangkan oleh PPP dalam Pemilu 1971. Demikian pula dalam penentuan wakil-wakil di parlemen NU memperoleh kursi terbanyak, tetapi ketegangan segera muncul ketika unsur Parmusi menuntut porsi perolehankursi lebih besar pada pemilu 1977, dimana PPP memperoleh kenaikan perolehan suara dari 94 kursi tahun 1971 menjadi 99 kursi tahun 1977. Konsensus semula yang disepakati tahun 1975 yang berdasarkan perbandingan rasio tahun 1971, ternyata secara sepihak dilanggar oleh pimpinan partai H.J Naro, dimanadengan bertambahnya perolehan kursi di parlemen justru mengurangi porsi unsur NU (yang seharusnya bertambah) dari 58 kursi berkurang menjadi 56 kursi. Kalangan NU tentu saja terpukul, tetapi mereka mampu menahan diri walaupun tetap menjadi masalah yang sekali waktu bisa terekspresikan sebagai pemicu konflik⁹.

Ketika pemilu tahun 1982 daftar calon yang diajukan kembali merugikan golongan NU. Permisi menuntut pencalonan yang lebih banyak dari pada tahun 1977 dan H.J Naronengakomodir tuntutan itu, sehingga NU yang sejak tahun 1977 sudah merasa dirugikan melancarkan protes keras pada kepemimpinan H.J Naro, selain sudah melanggar konsensus juga secara psikologis dapat dimaklumi karena pihak NU sudah menganggap diri sebagai berjasa dalam penambahan perolehan suara itu dan tentu saja kandidat tokoh NU yang hendak menduduki kursi sudah dipersiapkan. Faktanya NU benar-benar merupakan kekuatan massa terbesar dalam PPP.

⁷Budiman. *State and Civil society*, Monash “Paper onSouth-east Asia”. No.22, 1990, hlm.8

⁸Santoso. *Op.Cit*.hlm.115.

⁹Ida. *Op. Cit*, hlm. 43.

Alasan kenapa Naro melanggar konsensus tampaknya perlu dilihat dari aspek sejarah keberadaan Permusi adalah partai baru yang hendak membangkitkan kembali kekuatan Masyumi yang pernah menjadi dua kekuatan besar setelah PNI pada masa Soekarno. Ini seperti dikatakan oleh tokoh NU Mahbub Djunaedi, karena Parmusi merasa sebagai kelanjutan dari Masyumi, karena Masyumi menempati posisi yang lebih besar pada Pemilu tahun 1955, sehingga berdasarkan ukuran itulah ia meminta angka yang lebih banyak dalam pencalonan dibandingkan angka pencalonan tahun 1977¹⁰. Tentu saja faktor sejarah itu tidak dapat diabaikan, tetapi NU sendiri sudah merasa berada diatas angin melebihi kekuatan lain karena massa Masyumi dianggap sudah terpecah belah, ada yang masuk ke Golkar dan ada yang masuk ke PPP.

Walaupun begitu, protes NU tidak banyak diabaikan H.J Naro tetap tegar dengan keputusan daftar calon yang diusulkan dalam calon anggota DPR PPP untuk pemilu 1982. Sampai dengan peristiwa ini, dalam NU sendiri sudah terjadi faksi-faksi, ada yang disebut sebagai NU politis dan ada yang bukan politisi. NU politisi yang dirugikan, mengambil posisi berhadapan dengan kepemimpinan H.J Naro, sedangkan NU politisi yang beruntung masuk dalam kursi di DPR yang diwakili oleh kubu Idham Chalid, nampak lebih akomodatif terhadap kepemimpinan H.J Naro. Konflik ini lebih menunjukkan konflik akibat perebutan kursi di DPR¹¹.

Sepak terjang NU di PPP memang terasa menggigit. Bersama anggota dari unsur lain, tahap awal keberadaan PPPtelah mengagetkan pemerintah dengan melancarkan kritik tentang rancangan UU perkawinan yang diajukan pemerintah tahun 1973. Dewi Fortuna Anwar melihat ini sebagai suatu konflik berat antara pemerintah dengan PPP, apalagi didukung oleh kalangan masyarakat luar dengan adanya demonstrasi-demonstrasi baik mahasiswa maupun masyarakat umum yang membuat pihak pemerintah mengalah dan merevisi beberapa bagian dari RUU¹². RUU itu dianggap sangat sekuler bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam, dimanaberupaya mengeluarkan perkawinan dari pengadilan agama ke kantor catatan sipil.

Sikap PPP memang tidak selalu sejalan terhadap gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh kepemimpinan Golkar. Pada SU MPR tahun 1978 misalnya fraksi PPP yang dimotori oleh unsur NU (KH.Yusuf Hasyim,dkk) mengambil sikap "walk out" dari sidang karena ketidaksetujuannya dengan rancangan ketetapan tentang P-4 yang didalamnya memasukkan materi aliran kepercayaan. Disini, antara pemerintah (Golkar dan ABRI) dengan PPP terjadi perbedaan penafsiran tentang makna yang tersirat pada pasal 29 UUD 1964.

Beberapa peristiwa diatas diakui bahwa NU dalam PPP memegang peranan penting termasuk kekuatan massa dan anggotanya yang duduk di DPR

namun unsur NU tidak diberi kesempatan memimpin PPP dalam kurun waktu sekian lamanya. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan arah kebijakan pemerintahan Orde Baru yang berparadigma modernisasi melalui pembangunan, serta anggapan para aktor pemegang kendali pemerintahan Orde Baru, bahwa NU identik dengan penganut Islam tradisional

Pasca Muktamar Situbondo tahun 1983, NU memasuki babak baru setelah 34 tahun masa kemerdekaan terlibat secara substansi di kancah politik praktis. Era setelah muktamar ini ditandai pula dengan adanya generasi muda dalam kepeguruan Tanfidziah PBNU, yaitu terpilihnya KH.Abdurrahman Wahid dan juga beberapa tokoh organisator muda lainnya yang menggantikan KH.Idham Chalid. Pengurus Tanfidziah ini merupakan generasi ketiga dari pendiri NU dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Generasi ketiga NU ini kebanyakan dari kalangan intelektual. Pengurus Tanfidziah PBNU mulai tahun 1984 lebih didominasi oleh generasi yang mempunyai pola pikir dan tindakannya yang kritis, rasional dan kecenderungan perubahan dalam kultur NU yang sudah dianggap mapan. Perubahan pertama, nampak dari segi orientasi NU selama ini yang sudah benar-benar kental dengan kegiatan politik praktis, namun hal tersebut dianggap kekeliruan bagi tokoh muda NU, karena dianggap melupakan umatnya dan melupakan kegiatan pokoknya sebagai *jam'iyah diniyah*.

Gagasan yang dibangun oleh tokoh-tokoh NU muda memperoleh legitimasi formal melalui Muktamar Situbondo. Disini warga NU bebas untuk menentukan pilihan sesuai haknya masing-masing, kebebasan tersebut karena secara formal tidak memiliki ikatan politik dengan organisasi manapun, hal tersebut sebagai konsekuensi kembalinya organisasi ke Khittah 1926. Pernyataan tersebut menjadi salah satu keputusan Muktamar Situbondo, khususnya dalam hubungan NU dan politik, diputuskan bahwa hak politik adalah hak seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU, dan NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bertanggung jawab¹³.

Langkah netral yang diambil sebagai strategi kalangan pembaru adalah mencoba "mengompori" para mahasiswa, kalangan cendekiawan dan kalangan anti Soekarno seperti para mantan aktivis Masyumi. Tetapi yang terakhir ini, justru ingin berupaya menghidupkan kembali partai yang telah dibubarkan oleh Soekarno tahun 1960, sedangkan dua kelompok pertama, benar-benar secara gigih memperjuangkan agar pemerintah Orde Baru melakukan reorientasi sistem kepartaian. Wiliam Liddle mencatat tuntutan (yang sebetulnya berupa kebencian) kalangan cendekiawan pada kisaran waktu 1967-1969¹⁴.

¹⁰ Sitompul. 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan., hlm.131.

¹¹Ida. *Op. Cit.* hlm. 44.

¹² Anwar. April 1984, *Ka'bah dan Garuda:Dilema bagi Islam di Indonesia*, Artikel Prisma.No.4, ,hlm.17.

¹³*NU Kembali Ke Khittah 1926*, Jakarta: Risalah, hlm. 53.

¹⁴ Liddle. 1992. *Partisipasi dan Praktek Politik Indonesia pada awal Orde Baru*, Jakarta: Penerbit Grafiti. hlm.93.

Kesan buruk kalangan cendekiawan terhadap sistem banyak partai itu disimpulkan oleh Liddle dari analisisnya berdasarkan dinamika kelompok-kelompok diskusi, yang juga sangat terekspos di media massa pada kisaran waktu itu, sebagai berikut:

- 1) Partai-partai yang berorientasi pada ideologi daripada program (khususnya Islam dan Marhaenisme), merupakan ancaman terhadap modernisasi karena para pemimpin partai dalam legislatif lebih memperhatikan hal-hal seperti hubungan antara hukum nasional dalam hukum Islam.
- 2) Partai-partai yang memperuncing ketegangan ideologis di kalangan rakyat Indonesia, baik di tingkat elit maupun di tingkat massa.
- 3) Partai-partai menciptakan ketegangan dalam masyarakat, dimana kalangan pimpinan partai mengakumulasi dukungan massa dalam rangka persaingannya dalam elit politik di tingkat Jakarta.
- 4) Para pemimpin partai pada dasarnya adalah orang-orang yang mencari kesempatan untuk diri sendiri, serta lebih tertarik pada kesejahteraan mereka sendiri dan sekutu-sekutu mereka daripada kepentingan umum.
- 5) Pemimpin-pemimpin partai terpisah dari para pemilih yang semestinya mereka wakili.
- 6) Kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kepartaian tidak terbatas pada organisasi partai saja tetapi juga pada lembaga-lembaga lainnya.
- 7) Sistem banyak partai dianggap sebagai penyebab utama ketidakstabilan pemerintahan parlementer¹⁵.

Dengan adanya tuntutan kalangan cendekiawan pembaru yang terorganisir, secara politis memudahkan pemerintahan Soeharto untuk menggolkan gagasan-gagasan pemfusan partai. Dalam hal ini, sebenarnya Soeharto belum secara mutlak memperoleh dukungan massa atas keberadaannya, sebab para elit dan massa fanatik pendukung Soekarno juga dirasakan masih kuat. Oleh karena itu, dalam Sidang Umum MPRS tahun 1968, Presiden Soeharto melakukan tekanan keras untuk menunda pemilu¹⁶. Dalam SU MPRS tersebut walaupun tidak seluruhnya desepakati menunda Pemilu sampai paling lambat tahun 1971 dan Soeharto kemudian menetapkan batas waktu paling akhir.

Masa penundaan Pemilu itu, tampaknya dipergunakan oleh Soeharto untuk memantapkan langkah agar bisa menggeser peran Parpol. Ali Murtopo, orang yang memperoleh kepercayaan khusus dari Presiden Soeharto, mempunyai andil besar dalam membawa Golkar sebagai organisasi terkuat dan sekaligus mampu melemahkan peran-peran politik Parpol peserta Pemilu tahun 1971. Nampaknya kekuatan yang masih tetap dikhawatirkan adalah partai-partai nasionalis dan partai-partai Islam, karena *mainstream* ideologi kanan-kiri dianggap akan tetap hidup. Maka dari itu Ali Murtopo

oleh Sorharto juga ditugaskan secara khusus untuk mengamankan Pancasila dan UUD 1964, yang ditandai dengan:

Pertama, dilakukannya Operasi Khusus (Opsus)¹⁷, dimana wadah dan aktivitas Opsus ini cenderung bersifat kontrol yang mengarahkan sesuai dengan kehendak penguasa. Namun demikian, para pengamat politik menganggap langkah Ali Murtopo berimplikasi positif untuk tercapainya tujuan-tujuan Orde Baru, yakni: stabilitas dalam rangka teraselerasinya pertumbuhan ekonomi. Kedua, berkaitan dengan ini, dilakukan pula upaya perombakan kepemimpinan partai, dari yang cenderung kontra pada pemerintahan Soeharto kepada orang-orang yang seirama dengan gagasan pembangunan Orde Baru. Permusi, misalnya dalam kepemimpinannya mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, dicoba menyingkirkan tokoh-tokoh yang pernah aktif di Masyumi, karena peristiwa masa lalu yang mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah (ikut mendukung pemberontakan PRRI) akan terulang kembali dalam bentuk perlawanan yang lain.

Ketiga, basis-basis partai, khususnya partai Islam dimana NU dengan basis Islam tradisional dipecah belah. GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Indonesia) misalnya yang semula hanya merupakan organisasi independen yang bergerak dalam bidang pengembangan pendidikan, ditarik menjadi sebuah organisasi "underbow" Golkar, dengan berbagai fasilitas yang menguntungkan organisasi dan tokoh-tokoh GUPPI saat itu. Padahal dengan masuknya GUPPI di Golkar, secara langsung akan mempengaruhi massa NU, karena umumnya ulama-ulama dan kyai-kyai GUPPI adalah Kyai-kyai pesantren dengan basis massa yang cukup kuat, ditambah dengan tenaga-tenaga pengajar pegawai negeri di berbagai lembaga pendidikan yang berada dibawah koordinasi GUPPI yang secara langsung sebagai penyambung lidah Golkar. Mendasar wawancaranya dengan Pitut Suharto, Heru Cahyono menulis: Ali Murtopo memerintahkan aparat-aparat intelijennya untuk melakukan suatu operasi penggalangan ke seluruh wilayah, terutama di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Selama kurun waktu lebih enam bulan sejak pertengahan tahun 1970 operasi tersebut secara teliti menjelajahi pondok-pondok pesantren. Operasi yang dipimpin oleh Pitut Soeharto, tangan kanan Ali Murtopo dan tokoh yang dianggap paling berperan dalam kegiatan intelijen Ali sebelum dan sesudah itu, berusaha mengintroduksikan maksud-maksud pendirian GUPPI sehingga bisa diterima dengan penuh kesadaran untuk melepaskan atribut-atribut ke NU-annya untuk kemudian masuk GUPPI¹⁸.

Hampir dipastikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Soeharto waktuitu dengan cara menunda pelaksanaan Pemilu hingga tahun 1971 serta setrategi yang diterapkan seperti diatas, memastikan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971. NU merupakan salah satu partai yang paling merugi dengan penerapan setrategi itu,

¹⁵Ibid, hlm. 106.

¹⁶Ibid.

¹⁷ Cahyono. *Op. Cit.* hlm.65.

¹⁸ibid. hlm.84-85.

dimana pada tingkat elitnya terjadi ketegangan dan konflik sedang pada tingkat masanya terpecah menjadi dua, yaitu: (1) Memilih Golkar dan (2) NU. Belum dipastikan memang, berapa jumlah massa pemilih yang lari dari NU, namun yang jelas tanpa memecah belah massa NU dan juga massa Parmusi bekas pendukung Masyumi, sukar bagi Golkar untuk memperoleh kemenangan 68% dari massa pemilih tahun 1971 itu. Usai Pemilu tahun 1971, gagasan penggabungan partai berdasarkan penggolongan seperti disebut diatas, semakin jelas arahnya, terutama disepakatinya bahwa hanya akan ada tiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada Pemilu tahun 1971. Peranan Ali Murtopo, Sudjono Humardani, Sutopo Juwono dan Tjokropranolo menjadi semakin penting dalam megarahkan fusi partai. Mereka menjadi penghubung antara kelompok “Demokrasi Pembangunan” dan “Kelompok Persatuan”, yang akhirnya menjadi fraksi-fraksi di DPR pasca Pemilu 1971¹⁹. Terbentuknya kelompok atau fraksi-fraksi itu, apalagi sudah disepakati untuk adanya penyederhanaan peserta Pemilu tahun 1971, nampaknya tidak ada pilihan lain bagi parpol-parpol kecuali memfusi diri²⁰. Inilah awal secara formal menjadi kekalahan partai-partai politik dalam mempertahankan eksistensinya berhadapan dengan pemerintah Orde Baru yang memperoleh dukungan kuat dari ABRI. Apalagi ABRI merupakan salah satu unsur Golkar.

C. Penutup

Khittah NU 1926 yang merupakan dasar organisasi NU dengan mengedepankan fungsi syiar agama khususnya ajaran *ahlussunnah waljamaah* mulai dilakukan oleh para generasi NU berikutnya dengan ikut berpolitik. Kegiatan politik para elit NU yang menduduki jabatan pengurus besar memang bukanlah hal yang dilarang. Berawal dari kondisi tersebutlah kegiatan politik praktis seolah juga menjadi lahan garapan yang tidak boleh ditinggalkan, hingga pada puncaknya yaitu saat NU mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia NU mengambil peran pada banyak bidang seperti pendidikan, ekonomi, budaya, sosial hingga politik. Bidang politik sebenarnya bukanlah wilayah NU. Ulama-ulama NU saat itu dengan sepakat mendirikan NU untuk memperjuangkan ajaran *ahlussunnah waljamaah* tanpa ikut mencampuri urusan politik pemerintahan. Perkembangan NU yang cukup pesat khususnya di wilayah pedesaan di seluruh Indonesia sehingga menjadikannya organisasi yang harus diperhitungkan terutama pada masa pemerintahan pasca kemerdekaan secara perlahan menempatkan tokoh-tokoh NU untuk menduduki posisi-posisi penting baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Keadaan ini sedikit demi sedikit mendorong para pengurus besar NU tersebut mengikutsertakan dirinya aktif berpolitik.

Iklim politik pada masa Orde Baru ternyata tidak berpihak pada organisasi-organisasi politik pada

masa itu, NU yang notabene merupakan partai Islam terpaksa meleburkan diri kedalam PPP sebagai bentuk fusi politik partai-partai Islam. Pada awalnya tidak ada masalah bagi kalangan NU, namun setelah pemerintah mulai melakukan intervensi terhadap partai tersebut muncullah banyak konflik baik internal maupun eksternal.

Era depolitisasi dimaksudkan disini merupakan era dimana dilakukannya penyederhanaan partai-partai politik, dibarengi dengan tindakan pemerintah yang tidak mengfungsikan partai-partai politik yang ada secara terus menerus. Masa ini menunjukkan periode keterasingan partai politik atas peran politik yang seharusnya dimainkan, karena intervensi pemerintah dengan menggunakan birokrasi dan militer sebagai instrumen depolitisasi tersebut.

Gagasan fusi yang dilakukan pada 1973 secara formal dilakukan untuk menyederhanakan sistem perpolitikan di Indonesia, dengan tetap mempertahankan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat. Gagasan ini terwujud tidak lepas dari intervensi Presiden Soeharto setelah melihat adanya gejala akan munculnya perpecahan bila partai-partai politik yang ada tetap dipertahankan²¹.

Inti dari pemikiran ke arah fusi partai tampaknya lebih berorientasi dalam rangka mendukung strategi pembangunan Orde Baru yang menekankan aspek pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas yang mantap (*scurity approach*). Seruan presiden Soeharto pada parpol-parpol sebelum Pemilu tahun 1971, menunjukkan langkah sistematis bagaimana mengelompokkan partai-partai yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki identitas yang secara nisbiih berdekatan, disamping Golongan Karya, yang kemudian teridentifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, golongan nasionalis, yang terdiri dari PNI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik; kedua, golongan spiritual yang terdiri dari partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti); dan ketiga, Golongan Karya²².

Penyederhanaan partai juga bisa dilihat sebagai strategi untuk tidak menghidupkan kembali ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat yang terwujud pengelompokan partai politik. Ini merupakan kelanjutan dari upaya menghancurkan sisa-sisa pemikiran mantan Presiden Soekarno yang sangat gigih mempertahankan ideologi-ideologi yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ideologi Marxisme. Kalangan penentang Soekarno, baik ABRI maupun sipil, memiliki sikap militansi yang kuat untuk membersihkan seluruh peninggalan Orde Baru, baik itu berupa partai-partai politik maupun unsur-unsurnya yang ada di birokrasi. Mereka melihat hidupnya ideologi-ideologi melalui partai politik sebagai: 1) Sumber konflik berkepanjangan antar kubu-kubu ideologis, karena niscaya mereka akan terus berupaya mempertahankan dan menggolkan ideologinya, serta saling berebut status (melalui partai) dan kekuasaan (melalui birokrasi). 2) Berkaitan dengan itu, merupakan

¹⁹ Santoso. *Op. Cit.* hlm.105.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Santoso. *op.cit.* hlm 100.

²² *Ibid.* hlm.101

penghambat utama pembangunan ekonomi, yang berarti sekaligus menjadi penyebab keterbelakangan bangsa²³.

Pada tahun 1967, misalnya, muncul gagasan Dwi Partai di Jawa Barat, yang diprakarsai oleh kalangan pembaru dan memperoleh dukungan kuat dari Maijen Dharsono yang waktuitu sebagai Panglima Siliwangi²⁴. Hal tersebut bertujuan untuk secara radikal menggantikan partai-partai yang ada dan masih tetap bertahan pada masa Orde Baru. Kedua partai itulah diharapkan oleh pemikiran kelompok pembarunya Dharsono yang bersaing pada Pemilu tahun 1968, dimana keduanya sama-sama merupakan pemerhati modernisasi dan pembangunan, hanya akan berbeda dalam program-program yang akan ditawarkan²⁵. Singkatnya, pemikiran kalangan pembaharu menginginkan perombakan struktur politik secara mendasar.

Pemikiran kalangan pembaharu ini secara gigih memperjuangkan paradigma modernisasi dalam pembangunan. Keberadaan partai politik yang selama pemerintahan sebelum Orde Baru lebih merupakan wadah percaturan kepentingan ideologis, hendak dirubahnya menjadi wadah percaturan program pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Tetapi kesulitan utama yang dihadapi adalah akan terjadinya perpecahan dalam jajaran ABRI dan birokrasi sipil, sebab tentu saja masih ada pihak-pihak yang mengikuti alur pikiran masa Soekarno, apalagi pada tingkat masa pendukung fanatik partai. Kenyataan situasi seperti itu tentu saja rawan, karena jangan sampai menimbulkan kesan perpecahan intern (ABRI dan sipil), yang bisa dengan mudah melahirkan kubu-kubu yang saling berhadapan.

Daftar Pustaka

A. Surat Kabar

- Harian Jawa Pos, 3 Agustus 1992.
 Harian Merdeka, 14 Juni 1982.
 Harian *Pelita*, 11-2-1982.
 Prisma.No.4, April 1984.
 Suara Karya, 30 November 1989.
 Warta NU.No.13 tahun V/Maret 1989

B. Buku

- Anderson, Benedict.R.O.G. 1982. *Gagasan tentang Kekuasaan dalam Budaya Jawa*, Terjemahan, Jakarta.
- Anonim, *Nahdlatul Ulama Kembali Ke Khittah Sebuah Risalah*. Jakarta: LAKPESDAM
- Anonim. *Risalah Politik*. Jakarta: LAKPESDAM
- Anonim, *Sejarah Ringkas Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lakpesdam
- As'ad Said Ali. 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi: NU yang Saya Amati*, Jakarta: LP3ES
- Cahyono, Heru. 1982. *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Greg Fealy.2003. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, LKIS: Yogyakarta,.

Hikam, M.AS. 1984. *Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Sebuah Kajian Historis Struktural atas NU Sejak Tahun 1984*. Makalah. Dokumentasi PBNU.

Maksoem Machfoedz, 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat.

Santoso, Priyo B. 1988. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Liddle, R.W. 1992. *Partisipasi dan Praktek Politik Indonesia pada awal Orde Baru*, Jakarta: Penerbit Grafiti.

Sitompul, E. Martahan. 1989. *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU, Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nakamura, Mitsuo.1982. *Agama dan Perubahan Politik Tradisionalisme Radikal Nahdlatul Ulama Indonesia*Surakarta: Badan Penerbit Hapsara.

Soebagijo IN. 1982. *KH Masykur*, Jakarta:Penerbit Gunung Agung.

Siddiq, K.H. Achmad. *Penjelasan Khittah Nahdlatul Ulama*, Makalah. Dokumentasi LAKPESDAM.

Siddiq, K.H. Achmad . *Pemulihan Khittah NU*.Makalah. Dokumentasi LAKPESDAM.

Zuhri, Saifuddin. 1980. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif.

²³ Ida. 1996. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.

²⁴Cahyono, H. *Ibid*. hlm. 63.

²⁵*Ibid*.

